

EVALUASI DAN PENINJAUAN KURIKULUM BKI BERBASIS KKNi

Casmini

Abstrak

Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam, sebagai bagian dari satuan pendidikan tinggi, tentu mengharapkan para lulusannya mampu dan akan diarahkan pada penguasaan ilmu dan ketrampilan dalam bidang Bimbingan dan Konseling Islam secara professional, dengan memiliki kompetensi sesuai standar serta mampu bersaing secara global. Oleh karena itu, dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi tidak cukup hanya melakukan inovasi dan pengembangan institusi, tetapi juga dituntut untuk senantiasa melakukan evaluasi maupun penilaian terhadap seluruh komponen, sistem, maupun sumber daya yang dimilikinya. Hal ini urgen dilakukan guna mencapai kualitas mutu yang diharapkan. Salah satu komponen yang perlu perhatian ekstra adalah kurikulum. Sehingga evaluasi terhadap kurikulum yang digunakan oleh satuan pendidikan seperti Bimbingan dan Konseling Islam mutlak dilakukan. Maka dari itu, artikel ini dapat memberikan gambaran jelas tentang bagaimana seharusnya evaluasi dan peninjauan kurikulum Bimbingan dan Konseling Islam itu dilakukan. Yaitu, berpedoman pada KKNi (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia), dengan mempertimbangkan kebutuhan user dan stake-holder, serta mengacu pada Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang meliputi Standar nasional Pendidikan, Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.

Kata Kunci: *Evaluasi dan Peninjauan Kurikulum, KKNi*

Isi makalah ini pernah disampaikan dalam workshop evaluasi dan pengembangan kurikulum Fakultas Dakwah dan Komunikasi IAIN Walisongo Semarang pada 12-13 September 2014 dan dalam workshop evaluasi dan peninjauan kurikulum BKI STAIN Kudus pada 21 Oktober 2014.

A. Pendahuluan

Evaluasi dan peninjauan kurikulum BKI merupakan kegiatan strategis dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan mutu pendidikan program studi BKI. Murray Print mengatakan bahwa kurikulum harus senantiasa ditinjau kembali dalam upaya pemutakhiran kurikulum. Alasan mendasar menurut Murray Print dikemukakan “ *the very substance of schooling and the raison d’etre for teacher in schools*” dalam meningkatkan mutu pendidikan dan ruhnya adalah kurikulum.²

Secara umum, kurikulum merupakan gambaran gagasan pendidikan yang diekspresikan dalam praktik. Kurikulum didefinisikan sebagai seluruh program pembelajaran yang terencana dalam institusi pendidikan. Pondasi kurikulum meliputi kemas nilai (values) dan kepercayaan (beliefs) tentang apa yang harus diketahui mahasiswa dan bagaimana caranya mahasiswa dapat memperoleh dan atau menguasai pengetahuan. Kurikulum juga harus dikemas dalam bentuk yang mudah dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang terkait dalam institusi pendidikan, harus terbuka untuk dikritik dan harus mudah ditransformasikan dalam praktik.³

Evaluasi dan peninjauan kurikulum BKI dilakukan ketika diketahuinya dampak dari implementasi kurikulum BKI yang selama ini telah digunakan. Pengembangan atau Kurikulum BKI dilakukan secara menyeluruh dan bagian-bagian sesuai dengan kebutuhan program studi serta kemampuan dalam menjawab tantangan yang menghadang. Tantangan perkembangan IPTEKS terus memotivasi untuk dilakukannya perubahan dan penyesuaian kurikulum. Demikian pula perkembangan kebutuhan masyarakat dan pemangku kepentingan (stakeholder) ikut mendorong untuk melakukan pengembangan kurikulum BKI.

Berkaitan pengembangan kurikulum BKI maka perlu meninjau Undang-undang RI tentang Sistem Pendidikan Nasional, Nomor 20/2003 Bab X, Pasal 38, ayat 3 & 4 dinyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi yang bersangkutan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan untuk setiap program studi. Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan untuk setiap program studi. Peninjauan juga pada Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI

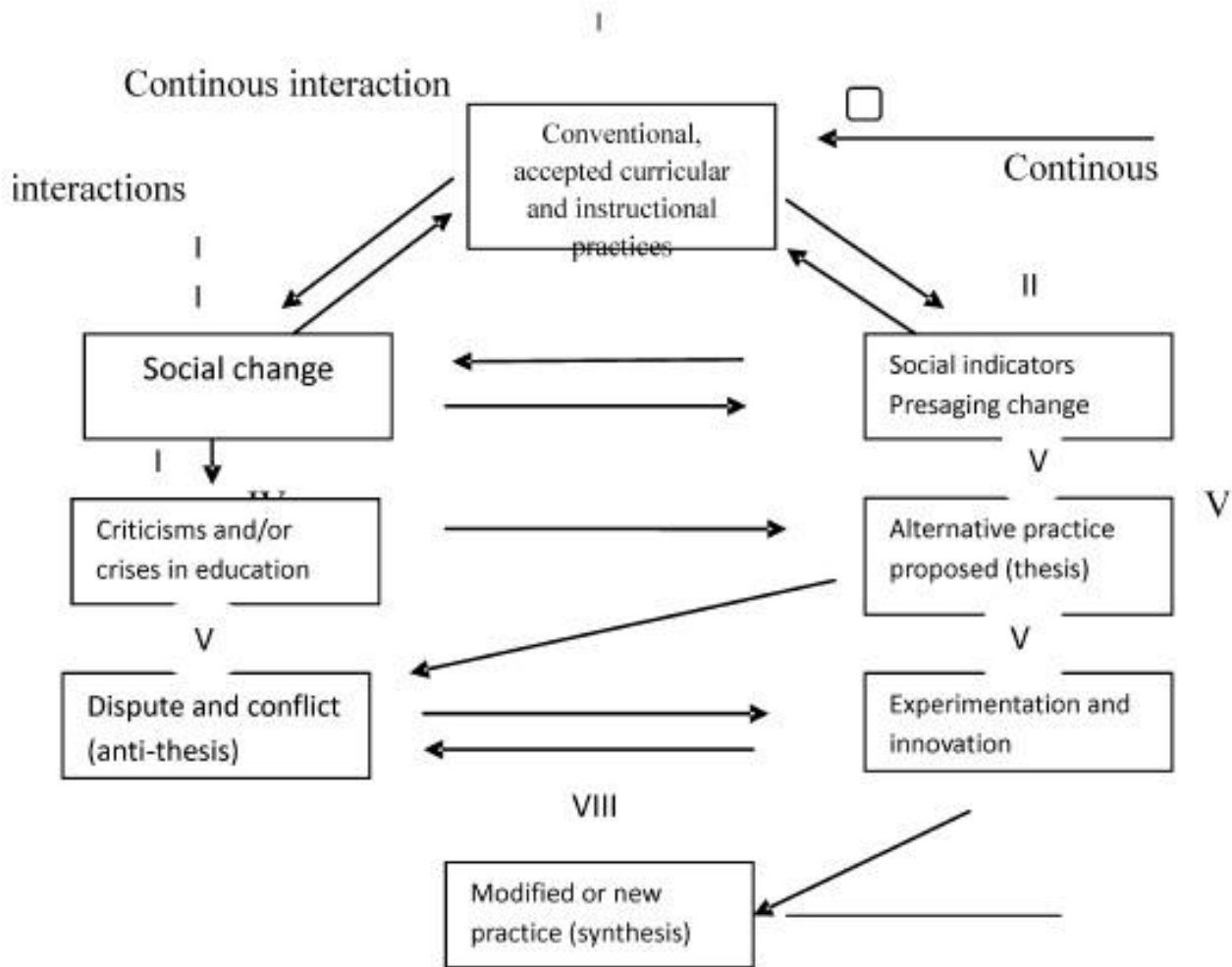
Murray Print, 1992. *Curriculum development and design (second edition)*, Sidney: Allen & Unwin.
Disadur dari Prideux D. ABC of learning and teaching in medicine: Curriculum design. BMJ 2003; 326: 268-270 dan Harsono. Pengantar Problem-based Learning. Edisi kedua, Medika-Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, 2005.

Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang meliputi Standar nasional Pendidikan, Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Dengan demikian BKI sebagai bagian dari pendidikan di perguruan tinggi memiliki otonomi untuk melakukan evaluasi dan peninjauan serta mengembangkan kurikulumnya dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.

Pertanyaan yang muncul adalah kurikulum BKI yang seperti apa yang mampu menjawab tantangan IPTEKS serta mengakomodir kebutuhan masyarakat dan *stakeholder* serta dapat menjawab tantangan masa depan? Tulisan ini mencoba menjawab pertanyaan tersebut dengan mendeskripsikan mengapa perlu pengembangan kurikulum BKI? Bagaimana strategi melakukan redesain kurikulum BKI dalam mengakomodir kebutuhan masyarakat dan *stakeholder* serta kecenderungan masa depan yang akan terjadi?

B. Mengapa Pengembangan Kurikulum BKI?

Pengembangan kurikulum BKI pada hakikatnya terjadi sepanjang Jurusan BKI masih ada. Dalam praktiknya, peninjauan dan revisi kurikulum secara berkala dilakukan antara 4-5 tahun sekali. Namun juga ada pandangan lain bahwa pemutakhiran kurikulum dapat dilakukan jika kondisi menghendaki adanya perubahan yang disebabkan kebutuhan masyarakat yang harus dilayani oleh Jurusan BKI atau adanya krisis kepercayaan terhadap mutu lulusan Jurusan BKI. Shane (1993: 67) mengilustrasikan pengembangan kurikulum sebagai sebuah proses perubahan sebagaimana yang terjadi dalam revolusi sains versi Thomas Khun. Visualisasi perubahan kurikulum versi teori revolusi sains Thomas Khun sebagai berikut:



Gambar1: Perubahan kurikulum versi teori revolusi sains Thomas Khun

Kurikulum BKI sudah seharusnya mengalami peninjauan ketika melihat tantangan dan peluang dari lulusan BKI dengan merespon persoalan yang terjadi di Indonesia. Tantangan yang menghadang bangsa Indonesia saat ini adalah kualitas SDM. Bentangan demografi Indonesia yang luas merupakan celah peluang berupa populasi usia produktif. Rentang 2010-2035 Indonesia dikaruniai potensi sumber daya manusia berupa populasi produktif terbesar sepanjang sejarah kemerdekaan.⁴

Sejalan dengan tantangan demografi Indonesia, generasi masa depan harus bersiap menghadapi perkembangan sosial budaya, teknologi informasi dan komunikasi termasuk di dalamnya gaya hidup. Meningkatnya ekspektasi kemakmuran masyarakat dan biaya hidup yang semakin mahal membentuk perilaku masyarakat yang syarat untuk mengejar finansial, yang seringkali terkadang menghalalkan segala cara demi mendapat uang. Secara

Muslimah, 2013. Tantangan dan Peluang Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam Menghadapi Masa Depan Bangsa, *Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*, Vol. 03, No.02, 2013.

psikologis, diri akan terus distimuli untuk memenuhi kebutuhan financial dan berujung pada banyaknya kasus kecemasan dan tingkat stres yang tinggi dalam menghadapi kehidupan. Pada posisi inilah peluang BKI untuk dapat memberikan layanan kepada masyarakat dalam menghadapi tantangan kehidupan. Jurusan BKI tentunya harus menyiapkan lulusan untuk siap menjadi pelayan masyarakat dalam merespon situasi globalisasi yang tidak bisa dinafikan dari setiap manusia Indonesia. Kurikulum BKI sudah semestinya dikembangkan dengan mempertimbangkan lulusan yang siap berkompetisi di tengah kehidupan global saat ini.

Contoh dari keberadaan Jurusan BKI Fakultas Dakwah dan Komunikasi IAIN Semarang dan STAIN Kudus memiliki kekhasan karena merupakan dua Perguruan Tinggi yang berada di wilayah pantura (pantai Utara). Masalah layanan bimbingan dan konseling sudah sepantasnya mengakomodir keadaan yang menjadi sorotan negatif untuk masyarakat pantura. Masalah yang menonjol dan sampai saat ini belum secara tuntas terselesaikan di pantura adalah masalah prostitusi.⁵ Serangkaian masalah prostitusi di pantura disebabkan oleh menganggap prostitusi sebagai jalan keluar dari kesulitan hidup, mendapatkan kesenangan dalam jangka pendek, kurang pengertian, kurang pendidikan, dan buta huruf sehingga dirinya menghalalkan pelacuran.

Regulasi pemerintah terkait dengan pengembangan pendidikan juga menjadi alasan Jurusan BKI untuk melakukan peninjauan dan evaluasi kurikulum. Saat ini, Jurusan BKI distimuli untuk berpikir dengan adanya nomenklatur penamaan jurusan dari Kementerian Agama RI yaitu BPI (Bimbingan Penyuluhan Islam). Regulasi ini merubah wacana pembahasan, yang sebagian merespon bahwa nama tersebut adalah adanya kemunduran ruang lingkup kajian, karena orientasi Jurusan tidak sampai pada kewenangan untuk melayani orang-orang yang memiliki masalah. BPI berlingkup pada kajian yang lebih bersifat preventif dan antisipatif dari layanan kasus yang terjadi di masyarakat. Selain itu, wilayah kajian BPI dibatasi pada kajian masyarakat dan untuk sekolah tidak lagi menjadi kajian di Jurusan ini. Persoalan ini menjadikan Jurusan BKI harus segera mengambil keputusan dan memantapkan dalam kurikulum, akan memilih nama tetap BKI tanpa mempedulikan regulasi Kemenag RI, atau merubah sesuai nomenklatur baru dengan nama BPI atau akan melakukan diskusi dengan pemerintah melalui asosiasi Jurusan BPI/BKI dengan merubah nama misalnya menjadi BPKI (Bimbingan Penyuluhan dan Konseling Islam).

Diah Setiowati dkk. 2013. Evaluasi Perda Nomor 6 Tahun 2011 tentang pemberantasan pelacuran di wilayah Kabupaten Batang. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Tahun 2013 hal. 6.

Regulasi lain adalah adanya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.⁶ Ada beberapa hal yang harus dicermati terkait dengan regulasi ini, terutama pada bab II Standar Nasional Pendidikan yang meliputi standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan dan standar sarana dan prasarana pembelajaran.

Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNi dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNi. Standar isi pembelajaran mensyaratkan untuk S1 adalah menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan secara mendalam. Standar proses pembelajaran jumlah sks yang harus dipenuhi untuk jenjang S1 adalah 144 sks dengan masa studi 4 sampai 5 tahun. Standar penilaian pembelajaran dapat dilakukan dengan teknik observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket dengan pelaporan penilaian huruf A setara dengan angka 4 berkategori sangat baik, huruf B setara dengan angka 3 berkategori baik, huruf C setara dengan angka 2 berkategori cukup, huruf D setara dengan angka 1 berkategori kurang atau huruf E setara dengan angka 0 berkategori sangat kurang.

Standar dosen dan tenaga kependidikan untuk S1 adalah berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 KKNi. Standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan pembelajaran, standar pembiayaan pembelajaran juga diatur dalam Peraturan Menteri ini.

Kedua regulasi pemerintah menyebabkan adanya perubahan aturan lembaga di perguruan tinggi masing-masing dan di dalamnya adalah Jurusan BKI. Perubahan ini sangat dimungkinkan terjadinya perubahan kurikulum secara menyeluruh dari semua unsur kurikulum yang meliputi dokumen

⁶ Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 1.

rencana dan dokumen nyata. Dokumen rencana meliputi daftar mata kuliah, silabus, GBPP dan rencana pembelajaran, serta dokumen nyata meliputi proses pembelajaran, penciptaan suasana pembelajaran, dan proses evaluasi (assessment). Demikian pula persoalan globalisasi dan perubahan kebutuhan mahasiswa BKI meniscayakan Jurusan BKI ada kemungkinan perlu kembali meninjau ulang visi dan misi, kompetensi serta bidang kajian dan bahkan mata kuliah (kurikulum secara menyeluruh).

C. Pengembangan Kurikulum BKI berbasis pada KKNi

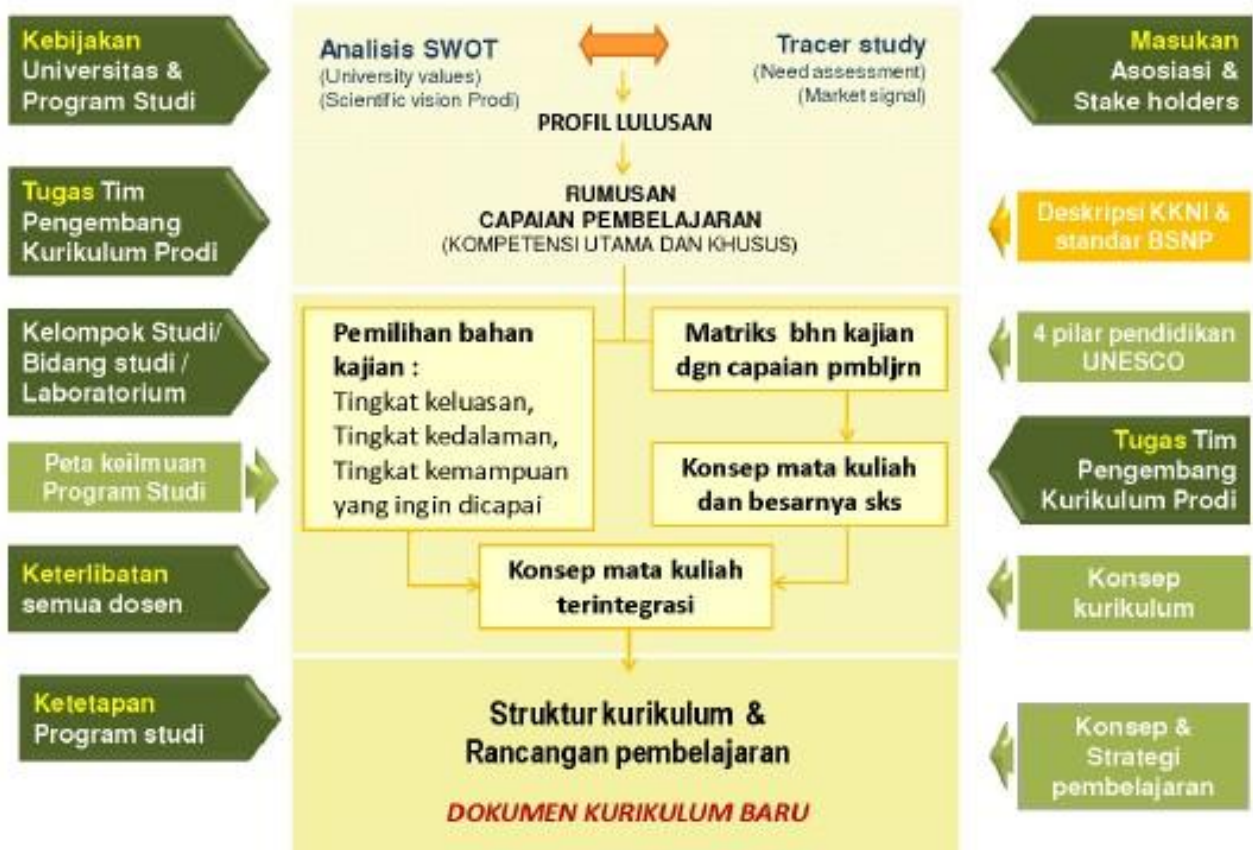
Pengembangan kurikulum BKI sudah seyogyanya mengacu pada KKNi (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia), karena regulasi pendidikan terstandarkan melalui KKNi tersebut. Berikut alur penyusunan kurikulum berbasis KKNi:



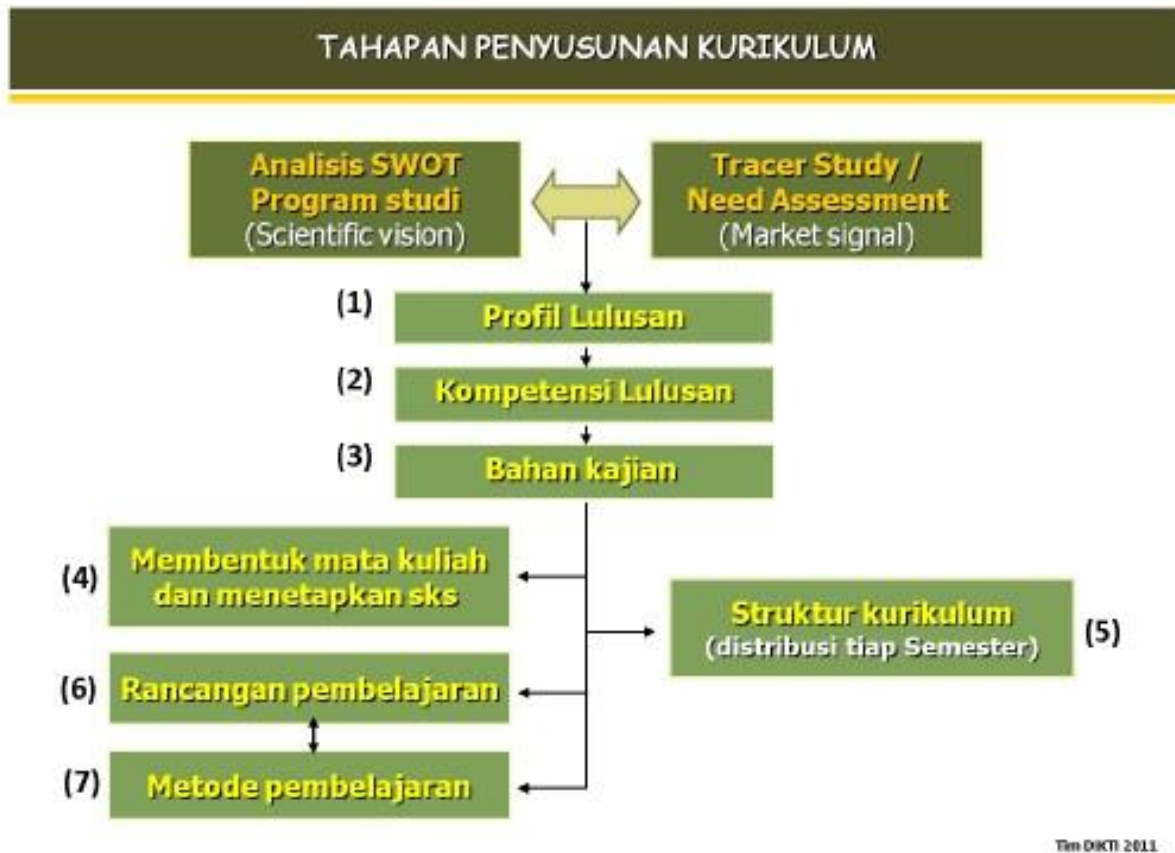
Kurikulum Pendidikan Tinggi



TAHAPAN PENYUSUNAN KURIKULUM



Berdasarkan tahapan penyusunan kurikulum maka, jurusan BKI perlu mencermati tahap demi tahap penyusunan kurikulum. Berikut Langkah sistematis yang dapat dilakukan:



1. Peninjauan kembali rumusan profil lulusan BKI

Sri Mulyani mendefinisikan profil sebagai pandangan sisi, garis besar, atau biografi dari diri seseorang atau kelompok yang memiliki usia yang sama.⁷ Menurut Victoria Neufeld profil adalah grafik, diagram atau tulisan yang menjelaskan suatu keadaan yang mengacu pada data seseorang atau sesuatu.⁸ Hasan Alwi mendefinisikan profil sebagai pandangan seseorang.⁹

Pembahasan profil lulusan BKI berarti mendeskripsikan tentang *outcomes/hasil* lulusan dari jurusan BKI. Orientasi bahasan pada peran dalam kehidupan yang dapat dilakukan oleh lulusan BKI di kemudian hari. Contoh profil Jurusan BKI adalah konselor masyarakat, motivator masyarakat, konselor pendidikan, pembimbing dan penyuluh.

⁷ Sri Mulyani.

⁸ Disadur dari Desi Susiani, 2009 hal. 41.

⁹ Hasan Alwi, 2005, hal. 40.

2. Peninjauan kembali Kompetensi Lulusan BKI

Perumusan kompetensi lulusan merupakan tahap setelah ditentukannya profil lulusan. Penentuan kompetensi lulusan merupakan titik tolak dalam menentukan kelancaran dan keberhasilan pengembangan tahap-tahap berikutnya dalam pengembangan kurikulum. Mengacu makna kompetensi sebagai seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu,¹⁰ maka tidaklah sederhana dalam melakukan peninjauan kembali rumusan kompetensi BKI yang telah disepakati pada kurikulum sebelumnya.

Kompetensi dalam konteks pendidikan mencakup tiga kemampuan, yaitu kemampuan kognitif (pengetahuan), kemampuan afektif (sikap, nilai, minat) dan kemampuan psikomotorik (keterampilan). Visualisasinya sebagai berikut:



Berdasarkan profil lulusan BKI yang telah ditetapkan, selanjutnya dapat dirumuskan kompetensi dari masing-masing dengan memperhatikan *values* (universitas), *scientific vision* (jurusan/program studi), dan *market signal* (stakeholder dan alumni). Contoh kompetensi lulusan sebagai berikut:

¹⁰ Lihat SK Mendiknas Nomor 045/U/2002.

No	Profil Lulusan	Kompetensi Utama	Kompetensi Pendukung	Kompetensi Lainnya
1	Konselor Masyarakat	1. Mampu mengidentifikasi masalah masyarakat 2. Mampu menyelenggarakan BKI untuk masyarakat 3. Mampu menyelesaikan masalah masyarakat 4. Menguasai berbagai pendekatan konseling	1. Memahami keragaman individu dan Masyarakat 2. Menguasai manajemen BKI Masyarakat 3. Menguasai perkembangan individu 4. Mampu memanfaatkan berbagai media BKI	1. Menguasai manajemen SDM 2. Menguasai manajemen konflik dan manajemen intervensi 3. Menguasai dasar-dasar keilmuan dakwah 4. Mampu mengembangkan penerapan konseling, motivasi dan pelatihan dalam berbagai bidang kehidupan
2	Motivator & Trainer	1. Mampu memberikan motivasi & pelatihan 2. Mampu melakukan mediasi dan advokasi	1. Menguasai manajemen pelatihan dan teknik-teknik motivasi 2. Menguasai prinsip-prinsip komunikasi antar pribadi	

Contoh elemen kompetensi sebagai berikut:

No	Rumusan Kompetensi	Elemen Kompetensi				
		LK	PIK	KB	SPB	PKKB
1	Mampu mengidentifikasi masalah masyarakat		√	√		
2	Mampu menyelenggarakan BKI untuk masyarakat	√	√	√	√	√
3	Mampu menyelesaikan masalah masyarakat	√	√	√	√	√
4	Menguasai berbagai pendekatan konseling		√			
5	Mampu memberikan motivasi & pelatihan	√	√	√	√	
6	Mampu melakukan mediasi dan Advokasi	√	√	√	√	√
7	Menguasai teori-teori pendidikan		√			
8	Mampu mengidentifikasi & menyelesaikan masalah peserta didik	√	√	√	√	
9	Mampu memberikan layanan BKI di lembaga pendidikan	√	√	√	√	√
10	Menguasai berbagai pendekatan konseling	√	√	√	√	√
11	Mampu merencanakan dan melaksanakan evaluasi BKI	√	√	√	√	
12	Memiliki kemampuan membimbing dalam bidang pribadi, sosial, karir, belajar dan agama	√	√	√	√	√
13	Menunjukkan kinerja akademik dan atau profesional dalam BKI	√	√	√	√	√

No	Rumusan Kompetensi	Elemen Kompetensi				
		LK	PIK	KB	SPB	PKKB
14	Memahami keragaman individu dan Masyarakat		√			
15	Menguasai manajemen BKI masyarakat		√	√		√
16	Menguasai perkembangan individu		√			
17	Mampu memanfaatkan berbagai media BKI	√	√	√	√	√
18	Menguasai manajemen pelatihan dan teknik-teknik motivasi	√	√	√		
19	Menguasai prinsip-prinsip komunikasi antar pribadi		√			
20	Memahami perkembangan kepribadian individu	√	√			
21	Mampu mengembangkan ilmu pengetahuan & teknologi BKI	√	√	√		
22	Menguasai manajemen SDM		√			
23	Menguasai manajemen konflik dan manajemen intervensi	√	√	√		√
24	Menguasai dasar-dasar keilmuan dakwah		√			
25	Mampu mengembangkan penerapan konseling, motivasi dan pelatihan dalam berbagai bidang kehidupan	√	√	√	√	√
26	Menguasai manajemen BK sekolah	√	√	√		
27	Mampu mengembangkan konsep-konsep filosofis dan teoritis dalam bidang bimbingan dan konseling	√	√	√		

3. Peninjauan kembali bahan kajian dalam kurikulum BKI

Hal yang perlu dilakukan dalam peninjauan kembali bahan kajian BKI adalah menetapkan kembali bahan kajian dengan menyusun peta keilmuan bidang studi. Ada tiga bahan pertimbangan yang perlu dicermati bahan kajian, yaitu;

- a. Bahan kajian yang ditetapkan oleh jurusan BKI, diambil dari peta keilmuan (IPTEKS) yang menjadi ciri jurusan atau dari khasanah IPTEKS yang akan dibangun oleh program studi/jurusan sendiri.
- b. Bahan kajian bisa ditambah dengan bidang/cabang ilmu yang dianggap diperlukan bagi lulusan untukantisipasi pengembangan ilmu di masa depan.
- c. Bahan kajian bisa juga dipilih berdasarkan analisis kebutuhan dunia kerja/profesi yang akan diterjuni oleh lulusan di masa datang.

Peninjauan ini dapat menggunakan format sebagai berikut:

CONTOH FORMAT MATRIKS KOMPETENSI DENGAN BAHAN KAJIAN

RUMUSAN KOMPETENSI		BAHAN KAJIAN (bisa juga dibagi dalam kelompok dibawah ini)													
		Inti keilmuan prodi				IPEKS pendukung			IPEKS pelengk		IPEKS Yang dikemb		Untuk masa depan		Ciri PT
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Kompetensi Utama														
2															
3															
4															
5															
6	Kompetensi Pendukung														
7															
8															
9	Kompetensi lainnya														
10															

endrop3ai@its.ac.id

Alternatif membentuk mata kuliah lewat matriks

KOMPETENSI	BAHAN KAJIAN				
	1	2	3	-	N
A			MK1		MK2
B		MK3			
C					
D				MK4	
E	MK6				
F					
G			MK5		
H					
I					
J					
K				MK7	
L					
M					

MK1 & MK2
beda jenis bahan kajian dalam satu kompetensi

MK3
tiga bahan kajian berkaitan dengan satu kompetensi

MK5 & MK6
satu bahan kajian untuk mencapai banyak kompetensi

MATA KULIAH ADALAH BUNGGUS DARI BAHAN KAJIAN

Tim DKTI 2011

4. Peninjauan kembali mata kuliah dan struktur kurikulum BKI

Penetapan mata kuliah berdasarkan pada profil lulusan, kompetensi lulusan dan bahan kajian. Dalam peninjauan kembali mata kuliah, maka mata kuliah pada kurikulum BKI lama dapat digunakan jika relevan dengan kompetensi yang ditetapkan. Dalam menyusun mata kuliah dan besaran sks dapat dibuat matriks yang menunjukkan hubungan antara kompetensi dengan bahan kajian, untuk membentuk sebuah mata kuliah.

Dalam konsep ini, sebuah mata kuliah memungkinkan berisi berbagai bahan kajian yang terkait erat dan diperlukan untuk disatukan karena pertimbangan efektifitas pembelajaran. Artinya suatu bahan kajian dipahami dalam konteks tertentu. Misalnya materi Assesmen BKI dapat digabungkan dengan materi Evaluasi BKI. Konsep ini yang memungkinkan kurikulum disusun secara blok.

Demikian pula sebuah mata kuliah dapat dibangun dari satu bahan kajian untuk mencapai satu kompetensi atau beberapa kompetensi sekaligus, sehingga dengan adanya penggabungan bahan kajian ini, ada kecenderungan jumlah mata kuliah menjadi lebih sedikit dengan bobot sks yang lebih besar.

Berikut contoh dalam matriks kompetensi dengan bahan kajian:

CONTOH FORMAT MATRIKS KOMPETENSI DENGAN BAHAN KAJIAN

RUMUSAN KOMPETENSI		BAHAN KAJIAN (bisa juga dibagi dalam kelompok dibawah ini)													
		Inti keilmuan prodi				IPEKS pendukung			IPEKS pelengk		IPEKS Yang dikemb		Untuk masa depan		Ciri PT
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Kompetensi Utama														
2															
3															
4															
5															
6	Kompetensi Pendukung														
7															
8															
9	Kompetensi lainnya														
10															

endrop3ai@its.ac.id

Alternatif membentuk mata kuliah lewat matriks

KOMPETENSI	BAHAN KAJIAN				
	1	2	3	...	N
A			MK1		MK2
B		MK3			
C					
D				MK4	
E	MK6				
F					
G			MK5		
H					
I					
J					
K				MK7	
L					
M					

MK1 & MK2
beda jenis bahan kajian dalam satu kompetensi

MK3
tiga bahan kajian berkaitan dengan satu kompetensi

MK5 & MK6
satu bahan kajian untuk mencapai banyak kompetensi

MATA KULIAH ADALAH BUNGKUS DARI BAHAN KAJIAN

Tim DEKTI 2011

CONTOH PEMBENTUKAN MATA KULIAH		BAHAN KAJIAN																		
		Inti keilmuan		IPEKS pendukung	IPEKS pelengkap	Yang dikemb	Untuk ms dpt	Chl PT												
RUMUSAN KOMPETENSI																				
1	Mampu mengidentifikasi masalah masyarakat	Mata kuliah A				Mk B														
2	Mampu menyelenggarakan BKI untuk masyarakat							Mk B												
3	Mampu menyelesaikan masalah masyarakat							Mk B												
4	Menguasai berbagai pendekatan konseling																			
5	Mampu memberikan motivasi & pelatihan																			
6	Mampu melakukan mediasi dan Adrokasi																			
7	Menguasai teori-teori pendidikan																			
8	Mampu mengidentifikasi & menyelesaikan masalah peserta didik																			
9	Mampu memberikan layanan BKI di lembaga pendidikan																			
10	Menguasai berbagai pendekatan konseling																			
11	Mampu merencanakan dan melaksanakan evaluasi BKI																			

Dalam menentukan besarnya jumlah SKS dari setiap mata kuliah dapat dipahami melalui makna besarnya sks sebagai berikut:

- a. Waktu yang dibutuhkan oleh mahasiswa untuk dapat mencapai suatu kompetensi/*learning outcomes* dengan metode pembelajaran yang dipilih.
- b. Waktu yang dibutuhkan mahasiswa untuk menguasai bahan/materi ajar dengan kedalaman dan keluasan yang ditetapkan.
- c. Besarnya peran dalam pencapaian kompetensi/*learning outcomes* lulusan, yang ditunjukkan dengan proporsi besarnya sks mata kuliah ini terbanding terhadap keseluruhan beban studi di tiap semester.

Struktur kurikulum BKI dengan mengikuti Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 49 tahun 2014 maka jumlah sks yang harus diselesaikan mahasiswa berstrata S1 adalah 144 sks dan harus diselesaikan 4-5 tahun. Oleh karena itu mata kuliah perlu kembali ditetapkan dan struktur kurikulum dapat disusun kembali dengan mengacu pada peraturan yang baru.

Secara teoritis ada dua alternatif model yang dapat digunakan dalam menyusun kembali mata kuliah dan struktur kurikulum BKI, yaitu model seri dan model paralel. Model seri lebih mendasarkan pada logika keilmuan BKI, asumsi dasar BKI, memiliki prasyarat, bersifat parsial dan integrasi dilakukan diakhir. Model paralel lebih mendasarkan pada strategi pembelajaran namun prasyarat dieliminir dalam proses pembelajaran dan integrasi dilakukan lebih awal.

5. Peninjauan kembali implementasi kurikulum

Implementasi kurikulum merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk mewujudkan atau melaksanakan kurikulum. Aplikasi berwujud proses transmisi dan transformasi seluruh pengalaman belajar kepada mahasiswa. Istilah implementasi kurikulum sering disebut dengan pembelajaran atau perkuliahan.

Implementasi kurikulum memiliki posisi yang sangat menentukan bagi keberhasilan sebagai rencana tertulis. Kurikulum yang sudah disusun, jika tidak diimplementasikan sama saja bahwa kurikulum tersebut hanya sebatas pemikiran yang diungkapkan secara tertulis. Demikian pula kurikulum BKI yang sudah disusun secara bagus perlu secara riil diaplikasikan oleh dosen di dalam proses pembelajaran atau perkuliahan. Alur implementasi kurikulum sebagai berikut:



Skema perubahan yang terjadi dalam perubahan kurikulum sebagai berikut:



6. Peninjauan kembali sistem evaluasi

Peninjauan kembali sistem evaluasi dalam konteks implementasi kurikulum yang berlaku pada program studi atau jurusan BKI sangat perlu dilakukan. Alasan mendasar adalah bahwa evaluasi merupakan salah satu komponen pokok kurikulum. Jika prodi/jurusan melakukan pengembangan, maka semestinya peninjauan kembali terhadap evaluasi dilakukan sesuai dengan karakteristik model kurikulum yang berlaku.

Dalam sistem pembelajaran serangkaian proses evaluasi yang dimulai dari perencanaan, evaluasi proses pelaksanaan dan evaluasi pengembangan kurikulum. Kurikulum yang telah ada perlu dievaluasi dalam garis besar rencana pembelajaran yang diimplentasikan dalam proses pembelajaran serta menghasilkan pembelajaran. Evaluasi yang dilakukan adalah evaluasi pada sumber belajar, evaluasi pelaksana kurikulum (dosen) dan evaluasi pada mahasiswa yang dikenai pembelajaran. Serangkaian kegiatan dalam evaluasi ini maka menghasilkan pengembangan pembelajaran. Berikut skema evaluasi program pembelajaran yang dapat dilakukan oleh jurusan BKI:



D. Penutup

Pengembangan kurikulum BKI merupakan kegiatan yang sangat esensial bagi upaya pemberdayaan kurikulum sebagai instrumen untuk pencapaian kompetensi lulusan dalam program studi atau jurusan BKI. Hal mendasar yang harus dilakukan adalah menerima pandangan serta saran dari berbagai pihak untuk kesempurnaan kurikulum yang akan diberlakukan. Oleh karena itu, sesuai dengan karakteristik kurikulum sebagaimana yang tertuang dalam rumusan profil lulusan, kompetensi, bahan kajian dan penetapan mata kuliah, struktur kurikulum serta implementasi kurikulum, evaluasi dan peninjauan kurikulum sangat perlu dilakukan dengan mengacu pada tuntutan dan kebutuhan masyarakat pengguna BKI serta *stakeholder*.

E. Refrensi

Diah Setiowati dkk. 2013. Evaluasi Perda Nomor 6 Tahun 2011 tentang pemberantasan pelacuran di wilayah Kabupaten Batang. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Fakultas

Harsono. 2005. *Pengantar Problem-based Learning*. Edisi kedua, Medika-Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada.

Murray Print, 1992. *Curriculum development and design (second edition)*, Sidney: Allen & Unwin.

Muslihati, 2013. Tantangan dan Peluang Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam Menghadapi Masa Depan Bangsa, *Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*, Vol. 03, No.02, 2013.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Prideux D. ABC of learning and teaching in medicine: Curriculum design. *BMJ* 2003; 326: 268-270.

